

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI SENGKETA TANAH WAKAF PADA AREA MAKAM MBAH ALI MAS'UD (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 10/PDT.EKS/2022/PA/KAB.SDA)

Oleh:

Muhammad Abil Fida Adimaski

202040100091

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus 2024

Pendahuluan

Wakaf adalah aspek penting dalam hukum Islam, menghubungkan kehidupan beragama dengan sosial ekonomi masyarakat Muslim. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibuat untuk mengatur praktik wakaf yang sebelumnya tidak teratur dan efektif. Wakaf dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial seperti mendirikan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Nazhir bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai tujuannya. Pengelolaan wakaf menghadapi berbagai masalah, termasuk sengketa tanah wakaf. Kasus NOMOR PERKARA 10/PDT.EKS/2022/PA KAB.SDA di Pengadilan Agama Sidoarjo melibatkan sengketa wakaf di area makam KH Ali Mas'ud (Mbah Ud). Sengketa ini terkait dengan pemanfaatan pendopo di kawasan makam yang awalnya dimaksudkan sebagai musholla. Pengadilan Agama Sidoarjo melakukan langkah-langkah strategis dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan eksekusi dengan baik. Eksekusi melibatkan penghapusan identitas pihak termohon eksekusi, termasuk prasasti, papan nama, banner, dan kotak amal.

Rumusan Masalah

1. Apakah putusan hakim atas EKSEKUSI SENGKETA TANAH WAKAF PADA AREA MAKAM MBAH ALI MAS'UD (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 10/PDT.EKS/2022/PA KAB.SDA) sudah sesuai dengan Undang-Undang ?
2. Bagaimana implementasi UU wakaf terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf PADA AREA MAKAM MBAH ALI MAS'UD (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 10/PDT.EKS/2022/PA KAB.SDA) ?

Penelitian Terdahulu

1. Widiyanto Eko Mei (2016) Melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN WAKAF OLEH NADZIR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)
2. Ma, sum Fitria (2021) Melakukan Penelitian yang berjudul ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM ERETAN INDRAMAYU
- 3) Purwohadi Ahmad (2018) melakukan studi berjudul “ANALISIS HAK ISLAM DAN HAK POSITIF YANG TERHADAP DENGAN MUSHOLA AS SHIDDIQIYAH IN DUSUN SLEMBI DESA MAYANGREJO KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO”.

Jurnal-jurnal tersebut membahas metode penelitian, hasil analisis, dan pendekatan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan tanah wakaf pada area makam, jurnal-jurnal tersebut dapat memberikan pemahaman yang berguna terkait analisis yuridis dalam konteks sengketa tanah.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menggunakan bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli. Bertujuan menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Umumnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, fokus pada analisis dan interpretasi peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab isu-isu hukum dalam konteks penelitian yang dilakukan.

Pembahasan

Analisis Kesesuaian Antara Putusan Hakim dengan Undang-Undang yang Mengatur Tentang Wakaf

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur prosedur perwakafan, pengelolaan, dan penyelesaian sengketa wakaf.
- Dalam kasus NOMOR PERKARA 10/PDT.EKS/2022/PA KAB.SDA, Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan Rofi'i dan Yakub HS sebagai nazhir yang sah berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Milik.
- Putusan hakim dalam kasus ini dianggap sesuai dengan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, terutama dalam hal prosedur ikrar wakaf, pengelolaan harta wakaf, dan penyelesaian sengketa.
- Putusan tersebut memerintahkan Mayor (Purn) Nurul Hadi untuk mengosongkan tanah dan mengembalikan uang kotak amal yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.

PEMBAHASAN

- Proses eksekusi dilakukan dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan.
- Penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui proses administratif dan peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Putusan hakim mencerminkan asas kewajaran dan keadilan, mempertimbangkan hak dan kepentingan semua pihak yang bersengketa.
- Secara keseluruhan, pelaksanaan putusan ini menunjukkan upaya penegakan hukum yang konsisten dengan peraturan yang berlaku tentang tanah wakaf di Indonesia.

Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Tentang Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa

- Putusan hakim dalam kasus NOMOR PERKARA 10/PDT.EKS/2022/PA KAB.SDA telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Implementasi UU Wakaf dalam penyelesaian sengketa ini mencakup berbagai aspek, termasuk penetapan ikrar wakaf, pengesahan nazhir, perlindungan harta benda wakaf, dan mekanisme penyelesaian sengketa.
- Pengadilan Agama Sidoarjo telah menerapkan prosedur hukum yang ketat dalam menangani kasus ini, termasuk penetapan nazhir yang sah dan perintah pengosongan tanah wakaf. Proses eksekusi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.
- Putusan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum wakaf dan melindungi aset wakaf sesuai dengan tujuan awalnya.
- Kasus ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang hukum wakaf dan penerapannya dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf. Implementasi UU Wakaf dalam kasus ini telah memperhatikan aspek hukum, sosial, dan budaya yang terkait dengan wakaf.

Kesimpulan

- Putusan hakim dalam kasus eksekusi sengketa tanah wakaf pada area makam Mbah Ali Mas'ud (Perkara No. 10/Pdt.Eks/2022/PA Kab.SDA) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Putusan ini menetapkan Rofi'i dan Yakub HS sebagai nazhir (pengelola) yang sah berdasarkan bukti hukum seperti Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah.
- Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di area makam Mbah Ali Mas'ud melibatkan penegakan aspek legal dan administratif. Proses penyelesaian mencakup penetapan nazhir yang sah, eksekusi putusan pengadilan, pengembalian penggunaan yang tidak sah, serta pengosongan dan penyerahan kembali tanah wakaf. Penyelesaian sengketa mempertimbangkan berbagai faktor dan melibatkan penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian terdahulu memberikan pemahaman tentang metode penelitian dan pendekatan hukum dalam penyelesaian sengketa tanah, meskipun tidak secara spesifik terkait tanah wakaf di area makam. Pelaksanaan putusan hakim dilakukan dengan pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, untuk memastikan ketertiban dan kesesuaian dengan prosedur hukum. Analisis yuridis menyimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Wakaf. Implementasi undang-undang dalam penyelesaian sengketa ini memperhatikan aspek-aspek hukum, sosial, dan budaya yang relevan.

Sekian Dan Terima Kasih 😊



